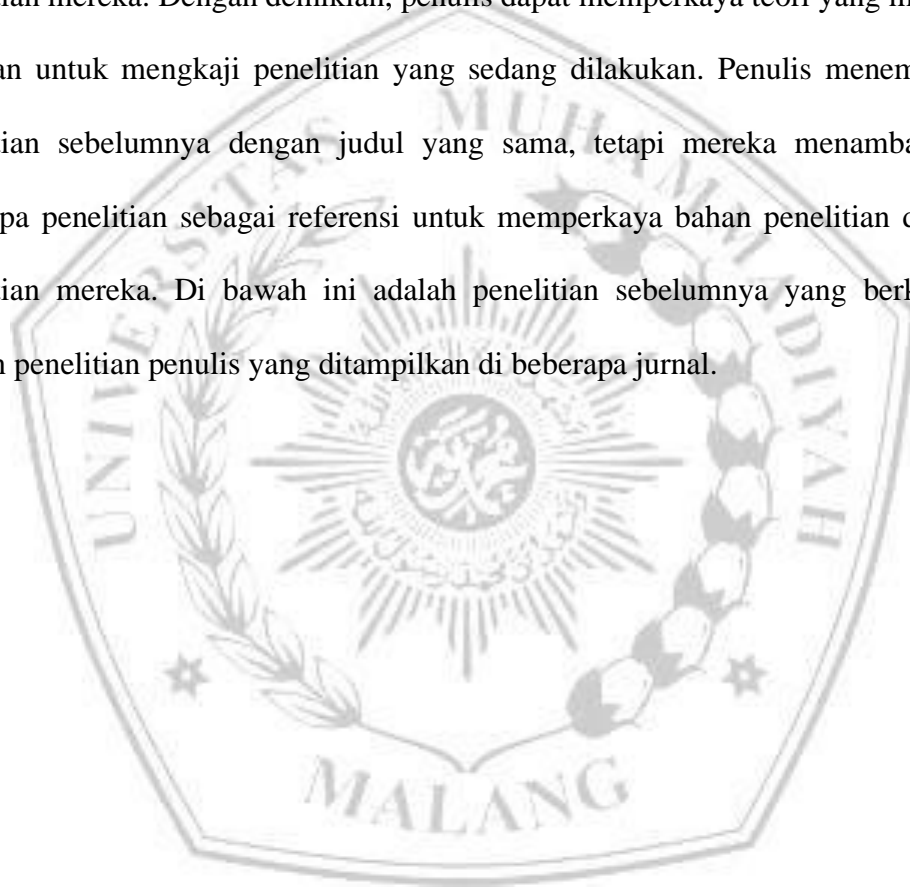


## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

penelitian terdahulu ini memberikan acuan bagi penulis untuk melanjutkan penelitian mereka. Dengan demikian, penulis dapat memperkaya teori yang mereka gunakan untuk mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Penulis menemukan penelitian sebelumnya dengan judul yang sama, tetapi mereka menambahkan beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahan penelitian dalam penelitian mereka. Di bawah ini adalah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis yang ditampilkan di beberapa jurnal.



No	Nama Penelitian Dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Dasri Sampulawa, Jumiati Tuharea, Titus Gaite 2022	Implementasi Bantuan Langsung Tunai Desa Terhadap Masyarakat Ekonomi Lemah di Dusun Lirang Desa Luhu	Jurnal ini membahas tentang bantuan langsung tunai dengan ekonomi yang lemah Dusun Lirang penelitian ini menunjukkan bagaimana cara kerja pemerintahan untuk meningkatkan Pembangunan kesejahteraan dan mampu memberdayakan Masyarakat dan Upaya pemerintahan Desa untuk menstabilkan ekonomi Masyarakat	Dari jurnal ini terdapat persamaan dan perbedaan dari peneliti yang sebelumnya yaitu jurnal ini meneliti terhadap ekonomi masyarakat yang lemah sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang Bantuan Langsung Tunai dan juga menggunakan metode deskriptif kualitatif metode yang sama.
2	Dionita Putri Anwar, Nurul Umi Ati, Roni Pindahanto. Jurnal 2020	Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir	Jurnal ini membahas tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Non Tunai (BPNT) Dalam Menanggulangi	Di jurnal ini terdapat persamaan dan perbedaannya yaitu persamaannya adalah tetnang pengimplementasi Bantuan Pemerinatah

		Kecamatan Batu Kota Batu	Kemiskina di Desa Sisir dengan tujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima dan mengefektifkan anggaran dalam jangka Panjang.	kepada Masyarakat perbedaannya yaitu mengenai tempat peneliti dan yang di teliti juga bantuan non tunai.
3	RefendyPaat,Sofia Pangemanan ,Frans Singkoh. Jurnal 2021	Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahas Selatan	Jurnal ini membahas tentang imlementasi BLT Dana Desa yang di berikan hasil penerima BLT ini sudah tepat sasarn menurut peneliti dari pihak pemerintahan Desa nya penelitian ini menangani dampak BLT covid19 dampak ekonomi dan mekanisme ketepatan penyaluran bantuan.	Persamaan dan perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini sama sama meneliti tentang bantuan langusng tunai dan implemnetasi nya di Desa lalu penelitia ini menggunakan metode purposive sampling perbedaan penelitian ini yaitu peneliti menggunakan tempat dan waktu yang berbeda.

## **B. Konsep Implementasi**

### **1. Pengertian implementasi**

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. ([WWW.KBBI](http://WWW.KBBI) 27 Agustus 2018 Oleh Zakky)

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi

pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan kebutuhan dasar proses ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu

1. Tahapan pengesahan perundang undangan
2. Keputusan pelaksana instansi
3. Kemudian kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
4. Dampak nyata keputusan baik yang di kehendaki maupun yang tidak
5. Dampak keputusan yang sebagaimana yang di harap kan instansi pelaksana
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundang undang

Proses perbaikan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal sebagai berikut

1. Penyiapan sumber daya dan metode
2. Persiapan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan diajukan
3. Penyediaan layanan pembayaran dan hal lain secara rutin .

Grindle Mulyadi (2015:47) menyatakan, “implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

Sedangkan menurut Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuantujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”. Kemudian menurut Jones (Sutojo, 2015:3), “implementasi sebagai “a process of getting additional resources so as to be figure out of to be done”. Implementasi dalam hal ini diartikan sebagai suatu proses mendapatkan sumber daya tambahan, dapat menghitung apa yang dapat dikerjakan

### **1. Implementasi kebijakan**

Pada dasarnya, sebuah kebijakan harus diterapkan untuk mencapai tujuannya. Tidak ada yang kurang atau lebih Mengimplementasikan kebijakan publik dapat dilakukan dalam dua cara yaitu secara langsung dalam bentuk program atau melalui pembuatan kebijakan yang merupakan hasil atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Dimulai dari program, proyek, dan kegiatan, rangkaian implementasi kebijakan dapat dilihat dengan jelas model ini mengadaptasi mekanisme manajemen

umum, terutama yang berkaitan dengan manajemen sektor publik. Kebijakan berasal dari program program, yang kemudian berkembang menjadi proyek, dan akhirnya menjadi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, masyarakat, atau bekerja sama dengan masyarakat

Menurut Wahab (Tahir, 2014:55): Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan

Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi

implementasi.

b) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif daya tersebut

dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan

Van Meter dan Van Horn (1974) dalam Agustino (2017: 126) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk

mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi

### **C. Konsep Bantuan Langsung Tunai**

#### **1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemberian bantuan uang tunai secara langsung dari pemerintah kepada masyarakat miskin, rentan, atau terdampak krisis, tanpa syarat kerja atau kontribusi balik dari penerima. Tujuannya adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga daya beli masyarakat dalam situasi darurat atau tekanan ekonomi tertentu (BPS : 2020)

#### **2. Sifat bantuan langsung tunai**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang berada di garis kemiskinan. Berikut adalah sifat-sifat bantuan langsung tunai:

1. Bentuk uang tunai : BLT di berikan dalam bentuk tunai kepada Masyarakat dan dengan adanya bantuan langsung tunai ini sebagai kebutuhan sehari hari seperti makanan dan pakaian tempat tinggal yang layak untuk Masyarakat desa.
2. Tujuan : tujuan utama dari BLT ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan

Masyarakat sehingga Masyarakat tersebut dapat hidup dengan lebih baik atau lebih layak kedepannya.

- c) Penyaluran : penyaluran bantuan BLT di berikan secara langsung oleh
1. petugas desa atau kepala desa atau pendamping yang di khususkan untuk mendampingi pembagian bantuan BLT.
  2. Frekuensi : bantuan BLT biasanya di berikan secara bertahap atau setiap 3 bulana sekali tergantung dari pihak desa nya dan bantuan ini jua memastikan untuk masyrakat desa nya bisa dapat bantuan secara rutin dan teratur.
  3. Jumlah bantuan : jumlah bantuan yang di berikan pada setiap desa ber beda- beda tergantung kebijakan pemerintahan desa dan sumber daya yang ada di desa tersebut umumnya bantuan langsung tunai ini di berikan sebesar RP. 300.000 per bulan.
  4. Kriteria penerima : penerima bantuan langsung tunai BLT biasanya di pilih dengan kriteria tertentu seperti kasusu ekonomi yang rendah, kondisi tempat tinggal dan akses layanan Kesehatan maupun Pendidikan
  5. Tidak Berkelanjutan: BLT bersifat sementara dan tidak dimaksudkan sebagai solusi jangka panjang untuk masalah kemiskinan atau kesenjangan sosial.

6. **Monitoring dan evaluasi** : setelah bantuan di berikan kepada Masyarakat di lakukan proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa bantuan yang di berikan tersebut sudah tepat sasaran. atau tidak dan bisa memberikan dampak yang positif atau tidak pada penerima nya.

BLT biasanya digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi dampak negatif dari kondisi ekonomi tertentu, seperti krisis ekonomi, pandemi, atau bencana alam.

### **3. Tujuan dasar hukum**

tujuan dasar hukum BLT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia diberikan secara efektif dan tepat sasaran kepada Masyarakat yang memerlukan

### **4. Manfaat bantuan langsung tunai**

Bantuan langsung tunai memberikan beberapa manfaat yang signifikan bagi Masyarakat yaitu :

1. **Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat** : BLT ini membantu Masyarakat yang mengalami ekonomi yang kurang untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan hidup sehari-hari ini secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada apa lagi Masyarakat desa sekarang banyak di bawah garis kemiskinan dan rentan.

2. Mengurangi kemiskinan : dengan memberikan bantuan secara langsung atau berupa tunai bisa membantu Masyarakat mengurangi beban atau kebutuhan sehari hari dan Masyarakat yang menerima bantuan bisa membeli kebutuhan sehari hari sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup.
3. Mengembangkan ekonomi lokal: bantuan langsung tunai BLT dapat mengembangkan ekonomi Masyarakat setempat karena bentuk bantuan ini di berikan secara tunai dan dapat di gunakan utnk membeli barang atau produksi oleh Masyarakat dan bisa membantu meningkatkan aktivasi ekonomi lokal.
4. Meningkatkan akses ke layanan dasar: dengan uang yang sudah di berikan pemerinathan desa kepada nasyrakat terbsebut dapat mengurangi biaya Pendidikan Kesehatan dan membayar biaya lainnya sehingga bisa mempermudah untuk mengakses layanan dasar yang sangat di perlukan.

Mengurangi ketidak setaraan: BLT dapat membantu dan mengurangi

5. ketidaksetaraan sosial kerna bisa memberikan kesempatan yang sama bagaimana semua Masyarakat dari sini bisa meningkatkan kestearaan
6. ketidaksetaraan sosial kerna bisa memberikan kesempatan yang sama bagaimana semua Masyarakat dari sini bisa meningkatkan kestearaan

Pengertian BLT Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program

bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam

bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.

Menurut Maun (2020) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa.

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.

### **1. Definisi Bantuan Langsung Tunai**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan sosial yang memberikan uang tunai secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan tujuan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. BLT biasanya

diberikan dalam bentuk uang tunai yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

**1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

- **Pasal 10:** Menyatakan bahwa bantuan sosial dapat berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

**2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai**

- Mengatur mekanisme penyaluran bantuan sosial, termasuk BLT, melalui sistem non-tunai untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

**3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia**

- **Permensos Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai:** Mengatur detail mekanisme penyaluran bantuan sosial, termasuk BLT, melalui bank atau lembaga keuangan lainnya.

- **Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Keluarga Harapan:** Meskipun fokus pada PKH, beberapa prinsip dalam regulasi ini juga relevan dengan penyaluran BLT, seperti kriteria penerima dan mekanisme penyaluran.

## **2. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai**

Program ini memiliki dasar hukum yang kuat untuk memastikan pelaksanaan yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang sering menjadi landasan pelaksanaan BLT di Indonesia:

### **4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

- **Pasal 34 ayat (1):** Negara bertanggung jawab atas pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar.
- **Pasal 34 ayat (2):** Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

### **5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial**

- **Pasal 4:** Menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- **Pasal 5:** Menetapkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui upaya-upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

### **6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin**

- **Pasal 6:** Menyebutkan bahwa penanganan fakir miskin merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- **Pasal 7:** Penanganan fakir miskin dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan dan pendekatan perlindungan.

## **7. Instruksi Presiden dan Surat Keputusan**

**Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka**

- **Percepatan Penanganan COVID-19:** Menyebutkan alokasi anggaran untuk BLT sebagai bagian dari upaya penanganan dampak ekonomi dari pandemi.
- **Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional:** Membuka jalan bagi alokasi anggaran darurat untuk program BLT.

## **8. Peraturan Daerah dan Kebijakan Lokal**

- Pemerintah daerah juga dapat mengeluarkan peraturan dan kebijakan lokal untuk mendukung pelaksanaan BLT di tingkat daerah, memastikan bahwa program ini dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

Tujuan dari program BLT sangat beragam dan mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari program BLT

### **1. Mengurangi Kemiskinan**

Memberikan bantuan keuangan langsung kepada masyarakat miskin untuk mengurangi beban ekonomi mereka Dengan memberikan uang tunai secara langsung, BLT membantu keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

### **2. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat**

Meningkatkan daya beli masyarakat terutama di kalangan rumah tangga miskin BLT memberikan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa, sehingga dapat mendorong permintaan domestik dan menggerakkan perekonomian.

### **3. Memberikan Perlindungan Sosial**

Melindungi masyarakat rentan dari risiko ekonomi dan sosial.

BLT berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang memberikan dukungan finansial kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat bencana, krisis, atau kondisi darurat lainnya.

### **4. Mengurangi Ketimpangan Ekonomi**

Mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat yang berbed Dengan mendistribusikan bantuan tunai kepada kelompok yang paling membutuhkan, BLT membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata.

## **5. Mendorong Peningkatan Kualitas Hidup**

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bantuan finansial. Dengan memenuhi kebutuhan dasar, BLT memungkinkan penerima bantuan untuk fokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara keseluruhan.

## **6. Stabilisasi Ekonomi**

Menstabilkan ekonomi makro terutama selama masa krisis ekonomi atau bencana. BLT dapat berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi dengan menjaga konsumsi rumah tangga tetap stabil, sehingga mengurangi dampak negatif dari guncangan ekonomi.

## **7. Meningkatkan Kesejahteraan Anak dan Pendidikan**

Mendukung kesejahteraan anak dan pendidikan.

Dengan tambahan pendapatan, keluarga miskin dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, seperti biaya sekolah, buku, dan alat tulis.

## **8. Meningkatkan Partisipasi Ekonomi**

Meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat miskin. Dengan bantuan tunai, masyarakat miskin dapat memiliki modal awal untuk memulai usaha kecil atau meningkatkan usaha yang sudah ada, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.

## **9. Memperkuat Modal Sosial**

Memperkuat modal sosial melalui kepercayaan dan solidaritas. Program BLT

yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat solidaritas sosial, terutama jika bantuan disalurkan secara transparan dan adil.

### **10. Merespons Krisis dan Kondisi Darurat**

Memberikan respons cepat terhadap krisis ekonomi dan kondisi darurat Dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19, BLT dapat memberikan bantuan cepat dan langsung kepada masyarakat yang terdampak, membantu mereka bertahan dalam situasi sulit.

#### **Manfaat Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari program BLT:

##### **1. Peningkatan Daya Beli**

BLT meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan rentan. Dengan tambahan pendapatan dari BLT, penerima bantuan dapat membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya, yang sebelumnya mungkin tidak terjangkau.

##### **2. Pengurangan Kemiskinan**

BLT membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan menerima bantuan keuangan langsung, keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga meningkatkan standar hidup dan mengurangi kesulitan ekonomi.

### **3. Stabilisasi Ekonomi**

BLT berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, terutama selama krisis ekonomi. Dengan memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang terkena dampak krisis, pemerintah dapat membantu menjaga tingkat konsumsi dan mengurangi dampak negatif dari guncangan ekonom

### **4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial**

BLT meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat penerima bantuan. Bantuan tunai memungkinkan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perumahan, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

### **5. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi**

BLT membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat. Dengan mendistribusikan bantuan kepada kelompok yang paling membutuhkan, BLT membantu mendistribusikan kekayaan secara lebih merata, sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan.

### **6. Meningkatkan Akses Pendidikan**

BLT dapat meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Dengan tambahan dana, keluarga dapat lebih mudah membayar biaya sekolah, membeli buku, seragam, dan kebutuhan pendidikan lainnya, yang dapat membantu anak-anak tetap bersekolah dan mengurangi angka putus sekolah.

## **7. Perbaikan Kesehatan**

BLT dapat berkontribusi pada perbaikan kesehatan penerima bantuan.

Dengan peningkatan daya beli, keluarga dapat membeli makanan bergizi dan membayar biaya kesehatan, seperti obat-obatan dan biaya kunjungan ke dokter, yang pada akhirnya meningkatkan status kesehatan mereka.

## **8. Pemberdayaan Ekonomi**

BLT dapat memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Penerima bantuan dapat menggunakan uang tunai untuk memulai usaha kecil atau meningkatkan usaha yang sudah ada, yang dapat membantu mereka menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

## **9. Dukungan dalam Situasi Darurat**

BLT memberikan dukungan finansial dalam situasi darurat. Selama bencana alam atau krisis seperti pandemi COVID-19, BLT dapat memberikan bantuan cepat dan langsung kepada mereka yang terkena dampak, membantu mereka memenuhi kebutuhan mendesak.

## **Peningkatan Kepercayaan terhadap Pemerintah**

BLT dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Program bantuan yang disalurkan dengan transparan dan tepat sasaran menunjukkan komitmen pemerintah dalam membantu warganya, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah lainnya.

## **Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang baik agar bantuan dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan efisien. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam mekanisme pelaksanaan program BLT:

### **1. Perencanaan dan Penentuan Kriteria Penerima**

**Identifikasi Penerima Bantuan:** Menentukan kriteria penerima BLT, seperti tingkat pendapatan, status pekerjaan, jumlah anggota keluarga, dan kondisi ekonomi lainnya.

**Data dan Verifikasi:** Mengumpulkan data calon penerima dari berbagai sumber, seperti data penduduk, data keluarga miskin, atau data dari instansi pemerintah terkait. Melakukan verifikasi data untuk memastikan kelayakan penerima.

### **2. Penyusunan Anggaran**

**Alokasi Dana:** Menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk program BLT dan mengalokasikan dana dari anggaran pemerintah pusat atau daerah.

**Pengajuan dan Persetujuan:** Mengajukan rencana anggaran kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan.

### **3. Sosialisasi Program**

**Informasi kepada Publik:** Melakukan sosialisasi program BLT kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti televisi, radio, internet, dan media cetak.

4. **Edukasi Penerima:** Memberikan informasi kepada calon penerima mengenai tujuan, manfaat, dan prosedur pelaksanaan BLT.

#### **Pendaftaran dan Verifikasi**

1. **Pendaftaran Penerima:** Membuka pendaftaran bagi calon penerima yang memenuhi kriteria. Pendaftaran dapat dilakukan secara online, melalui kantor desa/kelurahan, atau melalui petugas lapangan.
2. **Verifikasi dan Validasi Data:** Melakukan verifikasi dan validasi data penerima untuk memastikan mereka memenuhi kriteria dan mencegah penerimaan ganda atau tidak tepat sasaran.

#### **Penetapan Daftar Penerima**

1. **Penyusunan Daftar Penerima:** Menyusun daftar akhir penerima BLT berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
2. **Pengumuman Daftar Penerima:** Mengumumkan daftar penerima BLT secara transparan kepada publik, baik melalui papan pengumuman, situs web resmi, atau media lainnya.

#### **Penyaluran Bantuan**

1. **Metode Penyaluran:** Menentukan metode penyaluran BLT, apakah melalui transfer bank, kantor pos, atau penyaluran langsung tunai di lokasi tertentu.

**Pelaksanaan Penyaluran:** Melakukan penyaluran dana BLT sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Penyaluran dapat dilakukan secara bulanan atau sesuai

ketentuan. **Pengawasan dan Monitoring**

1. **Pengawasan Internal:** Membentuk tim pengawas internal untuk memantau pelaksanaan program dan memastikan bantuan disalurkan sesuai prosedur.
2. **Monitoring Lapangan:** Melakukan monitoring lapangan untuk memastikan penerima bantuan menerima BLT dan tidak ada penyelewengan dana.

**Evaluasi dan Pelaporan**

1. **Evaluasi Program:** Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program BLT untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak bantuan terhadap penerima.
2. **Pelaporan:** Menyusun laporan pelaksanaan BLT yang mencakup jumlah penerima, jumlah dana yang disalurkan, dan temuan-temuan dari pengawasan dan evaluasi. Laporan ini disampaikan kepada pihak berwenang dan dipublikasikan kepada masyarakat.

**Tindak Lanjut**

1. **Penanganan Keluhan:** Menyediakan mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan dari masyarakat terkait pelaksanaan BLT.

**Perbaikan dan Penyesuaian:** Berdasarkan hasil evaluasi dan keluhan yang diterima, melakukan perbaikan dan penyesuaian pada mekanisme pelaksanaan untuk program BLT selanjutnya. **Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah individu atau keluarga yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Program ini dirancang untuk membantu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan keuangan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Berikut adalah kategori penerima manfaat BLT:

### **Keluarga Miskin dan Rentan**

- 1. Kriteria:** Keluarga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Keluarga yang tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil dan hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan pendidikan.

### **Pekerja Informal**

- 2. Kriteria:** Pekerja di sektor informal yang tidak memiliki perlindungan sosial atau asuransi ketenagakerjaan dan Pekerja informal sering kali menghadapi ketidakpastian pendapatan dan tidak memiliki akses ke program perlindungan sosial formal, sehingga rentan terhadap guncangan ekonomi.

### **Lansia**

- 2. Kriteria:** Lansia yang tidak memiliki pendapatan tetap atau dukungan keluarga Lansia yang hidup sendirian atau tanpa dukungan finansial dari
- 3.** keluarga memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

## **Penyandang Disabilitas**

- 1. Kriteria:** Individu dengan disabilitas yang tidak mampu bekerja atau memiliki keterbatasan dalam memperoleh pendapatan. Penyandang disabilitas sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan membutuhkan dukungan finansial tambahan untuk kebutuhan khusus

## **Keluarga dengan Anak Yatim Piatu**

- 1. Kriteria:** Keluarga yang merawat anak yatim piatu atau anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Anak yatim piatu memerlukan dukungan tambahan untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari.

## **Pekerja yang Terkena PHK**

- 1. Kriteria:** Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan belum mendapatkan pekerjaan baru. Pekerja yang kehilangan pekerjaan memerlukan bantuan sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sambil mencari pekerjaan baru.

## **Petani dan Nelayan**

- 2. Kriteria:** Petani kecil dan nelayan yang mengalami penurunan pendapatan akibat faktor alam atau ekonomi. Petani dan nelayan sering menghadapi ketidakpastian pendapatan akibat cuaca buruk, kegagalan panen, atau harga komoditas yang fluktuatif.

## **Korban Bencana Alam**

- 1. Kriteria:** Keluarga atau individu yang terdampak bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor. Korban bencana alam memerlukan bantuan segera untuk pemulihan dan memenuhi kebutuhan dasar setelah kehilangan tempat tinggal atau sumber pendapatan.

## **Keluarga dengan Anak Yatim Piatu**

- 2. Kriteria:** Keluarga yang merawat anak yatim piatu atau anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Anak yatim piatu memerlukan dukungan tambahan untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari.

## **Pekerja yang Terkena PHK**

- 1. Kriteria:** Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan belum mendapatkan pekerjaan baru. Pekerja yang kehilangan pekerjaan memerlukan bantuan sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sambil mencari pekerjaan baru.

## **Petani dan Nelayan**

1. **Kriteria:** Petani kecil dan nelayan yang mengalami penurunan pendapatan akibat faktor alam atau ekonomi. Petani dan nelayan sering menghadapi ketidakpastian pendapatan akibat cuaca buruk, kegagalan panen, atau harga komoditas yang fluktuatif.

## **Korban Bencana Alam**

1. **Kriteria:** Keluarga atau individu yang terdampak bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor. Korban bencana alam memerlukan bantuan segera untuk pemulihan dan memenuhi kebutuhan dasar setelah kehilangan tempat tinggal atau sumber pendapatan

## **Mekanisme Penentuan Penerima Manfaat**

### **Pendataan dan Verifikasi**

1. **Pendataan:** Pemerintah melakukan pendataan calon penerima melalui survei rumah tangga, data dari instansi terkait, atau pendaftaran mandiri oleh calon penerima.
2. **Verifikasi:** Data calon penerima diverifikasi untuk memastikan kelayakan mereka berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pemeriksaan dokumen, kunjungan lapangan, atau konfirmasi dari pejabat setempat.

## **Penyusunan Daftar Penerima**

1. **Daftar Sementara:** Setelah verifikasi, pemerintah menyusun daftar sementara penerima manfaat yang memenuhi kriteria.
2. **Pengumuman dan Validasi:** Daftar penerima diumumkan kepada publik untuk mendapatkan masukan dan validasi dari masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan keberatan atau koreksi jika ada data yang dianggap tidak akurat.

## **Penetapan Daftar Akhir**

1. **Pengesahan:** Setelah melalui proses validasi, daftar akhir penerima manfaat disahkan oleh pihak berwenang.
2. **Distribusi:** Informasi tentang penerima manfaat disampaikan kepada pihak- pihak terkait untuk persiapan penyaluran bantuan

## **D. Konsep Kesejahteraan Sosial**

### **1. Pengertian Kesejahteraan sosial**

Kesejahteraan sosial adalah kondisi atau keadaan di mana individu atau kelompok menikmati kualitas hidup yang baik, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun ekonomi. Kesejahteraan mencakup berbagai aspek kehidupan yang memungkinkan seseorang untuk hidup dengan nyaman, sehat, dan Bahagia Kesejahteraan menurut pandangan masyarakat modern yaitu suatu kondisi dimana kebutuhan pokok seseorang dapat terpenuhi, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang layak yang dapat

mengangkat derajat kualitas hidupnya sehingga bisa mempunyai status sosial terhadap warga lainnya.. Berikut adalah beberapa aspek utama yang sering terkait dengan kesejahteraan:

1. **Kesejahteraan Ekonomi:** Meliputi pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, serta akses ke layanan dan fasilitas seperti pendidikan dan kesehatan.
2. **Kesejahteraan Fisik:** Kesehatan fisik yang baik, termasuk akses ke layanan kesehatan yang memadai, lingkungan yang bersih, dan gaya hidup yang sehat.
3. **Kesejahteraan Mental:** Kesehatan mental dan emosional yang baik, yang mencakup perasaan bahagia, bebas dari stres berlebihan, kecemasan, dan gangguan mental lainnya.
4. **Kesejahteraan Sosial:** Hubungan sosial yang baik dengan keluarga, teman, dan komunitas, serta merasa diterima dan dihargai dalam lingkungan sosial.
5. **Kesejahteraan Lingkungan:** Hidup dalam lingkungan yang bersih, aman, dan mendukung kesejahteraan individu, seperti akses ke air bersih, udara yang tidak tercemar, dan ruang hijau.
6. **Kesejahteraan Spiritual:** Rasa kedamaian dan kepuasan yang berasal dari nilai-nilai spiritual atau kepercayaan agama, serta hubungan yang harmonis dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri.

## **E. Konsep Kemiskinan**

### **Penanggulangan kemiskinan**

Penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan. Berikut adalah beberapa strategi penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan Mengurangi Beban Pengeluaran Pemerintah menggunakan program perlindungan sosial dan subsidi untuk mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan Penanggulangan kemiskinan selalu menjadi fokus utama dalam pembangunan. Indonesia sendiri berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari kisaran 40 persen pertengahan 1970-an hingga 9,22 persen di 2019. Selama kurun waktu tersebut, tingkat kemiskinan sempat mengalami peningkatan terutama saat krisis 1997-1998 dan 2006- 2007. kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan 10,19 persen pada September 2020. Tren penurunan angka kemiskinan empat dekade terakhir yang disertai peningkatan kemiskinan pada beberapa periode “krisis” menunjukkan bahwa masalah kemiskinan dan kesejahteraan sangat dinamis. Selain itu, isu kemiskinan juga bersifat multidimensi, yakni bukan semata terkait keterbatasan ekonomi, tetapi juga kurangnya akses ke pendidikan serta kesehatan, dan dimensi lain.

## **Kemiskinan**

adalah keadaan di mana individu atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan bisa dilihat dari berbagai perspektif, seperti ekonomi, sosial, dan multidimensional.

### **Kemiskinan Absolut**

Kemiskinan absolut mengacu pada ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup, seperti makanan, air bersih, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Contohnya adalah standar yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu hidup dengan kurang dari \$1.90 per hari.

### **Kemiskinan Relatif**

Kemiskinan relatif adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok memiliki pendapatan atau sumber daya yang lebih rendah dibandingkan dengan mayoritas populasi di masyarakat tersebut, sehingga mereka tidak dapat menikmati standar hidup yang dianggap layak dalam konteks sosial dan budaya mereka.

### **Kemiskinan Multidimensional**

Kemiskinan multidimensional mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Indeks Kemiskinan Multidimensional (MPI) digunakan untuk mengukur berbagai privasi yang dialami oleh seseorang atau rumah tangga dalam beberapa dimensi yang

### **Kemiskinan Struktural**

Kemiskinan struktural disebabkan oleh struktur ekonomi dan sosial yang menghalangi akses individu atau kelompok tertentu terhadap sumber daya dan peluang. Ini sering kali berkaitan dengan ketidaksetaraan, diskriminasi, dan kebijakan yang tidak adil.

### **Kemiskinan Siklis**

Kemiskinan siklis adalah kondisi kemiskinan yang terjadi karena kejadian atau krisis tertentu, seperti kehilangan pekerjaan, bencana alam, atau masalah kesehatan. Keadaan ini bisa bersifat sementara jika ada intervensi yang tepat.

